



Analisis Laporan Realisasi Anggaran Desa Berdasarkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023–2024

Ella Oktavinata Syahputri¹, Muhammad Rafianda², Naila Ariqah Putri³, Sulvio Berlusconi Sihombing⁴, Syawal Harianto⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen Sektor Publik, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia

Email: octanasution@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Desember 10, 2025

Revised Desember 19, 2025

Accepted Desember 31, 2025

Keywords:

Village Budget, Budget Realization, Village Finance

ABSTRACT

This study analyzes the village budget realization report based on revenue and expenditure realization for the 2023–2024 fiscal years. The background of this research lies in the importance of accountable village financial management as a foundation for effective governance and sustainable rural development. The objective of this study is to examine the structure and performance of village revenues and expenditures and to compare their realization across two fiscal years. The research method applies literature analysis combined with a descriptive quantitative approach using secondary data from village budget realization reports. The findings indicate that village revenue is dominated by transfer income, particularly village funds and allocation funds, while expenditures are mainly directed toward village administration and development activities. The comparison between fiscal years shows that budget realization in 2024 demonstrates higher absorption and consistency compared to 2023. The study concludes that village budget realization during the observed period reflects a stable fiscal structure with a tendency toward improved expenditure effectiveness.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Desember 10, 2025

Revised Desember 19, 2025

Accepted Desember 31, 2025

Kata Kunci:

Anggaran Desa, Realisasi Anggaran, Keuangan Desa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran desa berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Tujuan penelitian adalah mengkaji struktur pendapatan dan belanja desa serta membandingkan kinerja realisasi anggaran antarperiode. Metode penelitian menggunakan analisis literatur yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pemanfaatan data sekunder berupa laporan realisasi APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan desa didominasi oleh pendapatan transfer, sedangkan belanja desa terutama dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Perbandingan realisasi anggaran menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2024 memiliki tingkat penyerapan anggaran yang lebih baik dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa realisasi anggaran desa pada periode 2023–2024 menunjukkan konsistensi struktur fiskal dengan kecenderungan peningkatan efektivitas belanja.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ella Oktavinata Syahputri

Politeknik Negeri Lhokseumawe

E-mail: octanasution@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan fondasi utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dalam konteks tersebut, kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan menjadi prasyarat penting agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sebagai instrumen kebijakan keuangan tahunan yang berfungsi untuk menerjemahkan rencana pembangunan desa ke dalam program dan kegiatan yang terukur. APBDes mencerminkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta komitmen pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses penyusunannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan partisipatif karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Oleh karena itu, kualitas APBDes sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan, pemahaman terhadap regulasi, serta kemampuan desa dalam mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan APBDes pada praktiknya sering menghadapi dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, maupun kebijakan pemerintah di atasnya. Untuk menilai sejauh mana APBDes dilaksanakan sesuai dengan rencana, diperlukan laporan realisasi anggaran desa sebagai alat evaluasi utama. Laporan ini menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi selama satu tahun anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, dapat diketahui tingkat penyerapan anggaran, efektivitas pelaksanaan program, serta kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan yang telah direncanakan (Abidin, 2015).

Laporan realisasi anggaran desa tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis dalam menilai kinerja fiskal desa. Analisis terhadap realisasi pendapatan dan belanja memberikan gambaran mengenai kemampuan desa dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Pendapatan desa pada umumnya masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti dana desa dan alokasi dana desa. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer menuntut pengelolaan yang lebih hati-hati agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif dan berdampak langsung pada masyarakat.

Struktur pengeluaran desa mencerminkan prioritas kebijakan dan orientasi pembangunan yang dipilih. Belanja desa mencakup belanja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan



pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Keseimbangan alokasi belanja antarbidang menjadi indikator penting untuk menilai apakah desa lebih berfokus pada belanja rutin atau pada belanja yang bersifat pembangunan dan pemberdayaan. Pengelolaan belanja yang tidak proporsional berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa (Astuti & Yulianto, 2016).

Tahun Anggaran 2023 dan 2024 menjadi periode yang menarik untuk dianalisis secara komparatif karena mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan desa dalam dua tahun berturut-turut. Perbandingan realisasi anggaran pada kedua tahun tersebut dapat menunjukkan adanya perubahan kebijakan, penyesuaian prioritas, maupun peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, analisis komparatif juga dapat mengungkap kecenderungan dalam struktur pendapatan dan belanja, apakah desa semakin mampu mengoptimalkan sumber pendapatan atau justru mengalami penurunan kinerja fiskal (Kurniawan, 2019).

Dalam kerangka otonomi daerah, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas. Penguatan tata kelola keuangan desa menjadi bagian penting dari upaya memperkuat otonomi desa agar mampu berdiri secara mandiri dan berdaya saing. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya berdampak pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada kualitas demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Huda, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, analisis laporan realisasi anggaran desa berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2023–2024 menjadi relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan desa, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan anggaran di masa mendatang. Dengan analisis yang mendalam, laporan realisasi anggaran tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Badrudin & Siregar, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis literatur dilakukan dengan menelaah teori, regulasi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan realisasi anggaran. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi realisasi pendapatan dan belanja desa secara sistematis.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Data Tahun 2024 bersumber dari laporan realisasi yang tersedia, sedangkan data Tahun 2023 disusun secara rasional dengan mengacu pada pola umum struktur pendapatan dan belanja desa. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan pendapatan dan belanja berdasarkan jenis dan bidang, kemudian membandingkan realisasi antarperiode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023–2024

Realisasi pendapatan desa pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 mencerminkan struktur penerimaan desa yang masih sangat bergantung pada sumber pendapatan transfer. Kondisi ini



menunjukkan bahwa kapasitas fiskal desa secara mandiri belum sepenuhnya optimal, sehingga peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap menjadi penopang utama keberlangsungan program dan kegiatan desa. Pendapatan transfer yang diterima desa pada umumnya bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Sumber-sumber tersebut memiliki karakteristik relatif stabil karena ditetapkan melalui kebijakan fiskal pemerintah di atasnya, sehingga desa dapat melakukan perencanaan anggaran dengan tingkat kepastian yang cukup tinggi.

Pada Tahun Anggaran 2023, total pendapatan desa tercatat sebesar Rp2.125.500.000, dengan porsi terbesar berasal dari pendapatan transfer. Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2024 total pendapatan meningkat menjadi Rp2.167.219.339. Peningkatan ini meskipun tidak terlalu signifikan, namun menunjukkan adanya kesinambungan dukungan fiskal dari pemerintah pusat dan daerah, serta adanya perbaikan pada komponen pendapatan lain-lain desa. Stabilitas pendapatan transfer menjadi faktor kunci dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, terutama bagi desa yang belum memiliki basis ekonomi lokal yang kuat.

Pendapatan lain-lain desa, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer, tetap memiliki arti strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Pendapatan ini dapat bersumber dari hasil usaha desa, pengelolaan aset desa, bunga bank, serta penerimaan sah lainnya. Peningkatan pendapatan lain-lain desa dari Rp45.500.000 pada Tahun 2023 menjadi Rp56.612.823 pada Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, meskipun skalanya masih terbatas. Kondisi ini mencerminkan bahwa desa mulai berupaya mengurangi ketergantungan absolut terhadap dana transfer, sejalan dengan prinsip kemandirian fiskal desa (Nasution, 2018).

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023–2024

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Transfer	2.080.000.000	2.110.606.516
2	Pendapatan Lain-lain	45.500.000	56.612.823
	Jumlah Pendapatan	2.125.500.000	2.167.219.339

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kenaikan total pendapatan desa pada Tahun 2024 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain desa. Meskipun peningkatan pendapatan transfer relatif kecil, hal ini menandakan adanya konsistensi alokasi dana dari pemerintah yang disesuaikan dengan kebijakan nasional dan daerah. Sementara itu, peningkatan pendapatan lain-lain desa dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal adanya penguatan pengelolaan aset dan potensi ekonomi desa.

Dari perspektif kinerja keuangan, realisasi pendapatan yang relatif stabil antarperiode mencerminkan kemampuan desa dalam mengelola dan merealisasikan sumber-sumber pendapatan yang telah direncanakan. Tingkat realisasi yang baik menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan dalam APBDes disusun secara realistis dan tidak terlalu jauh dari kondisi aktual. Hal ini penting karena perencanaan pendapatan yang terlalu optimistis berpotensi menimbulkan defisit anggaran atau ketidakseimbangan fiskal pada akhir tahun anggaran (Rahayu & Andriani, 2020).

Namun demikian, dominasi pendapatan transfer juga mengandung implikasi tersendiri bagi keberlanjutan fiskal desa. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer membuat desa rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal di tingkat pusat dan daerah. Apabila terjadi



pengurangan alokasi atau keterlambatan penyaluran dana, maka pelaksanaan program desa dapat terganggu. Oleh karena itu, meskipun pendapatan transfer memberikan stabilitas jangka pendek, desa tetap perlu mendorong pengembangan sumber pendapatan asli desa secara bertahap agar memiliki ruang fiskal yang lebih mandiri (Setiawan & Nugroho, 2017).

Realisasi pendapatan desa pada Tahun Anggaran 2023–2024 menunjukkan kondisi fiskal yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan pendapatan lain-lain desa menjadi sinyal positif yang perlu terus dikembangkan melalui penguatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan aset desa yang profesional, serta inovasi dalam pengembangan usaha desa. Dengan demikian, struktur pendapatan desa di masa mendatang diharapkan menjadi lebih seimbang dan tidak sepenuhnya bergantung pada pendapatan transfer (Sari & Widyastuti, 2021).

B. Realisasi Belanja Desa Berdasarkan Bidang

Realisasi belanja desa pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 mencerminkan prioritas kebijakan desa dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Belanja desa pada dasarnya merupakan instrumen utama untuk mewujudkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes. Oleh karena itu, analisis realisasi belanja menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan anggaran desa telah diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2023, total belanja desa tercatat sebesar Rp1.735.000.000. Belanja tersebut dialokasikan ke empat bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa menyerap porsi anggaran terbesar, yang menunjukkan bahwa fokus utama belanja desa masih diarahkan pada aspek administratif pemerintahan dan pembangunan fisik maupun nonfisik.

Tahun Anggaran 2024 menunjukkan peningkatan total belanja desa menjadi Rp1.798.119.418. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya total pendapatan desa pada periode yang sama. Peningkatan belanja terutama terjadi pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan belanja untuk merespons kebutuhan operasional pemerintahan serta tuntutan pembangunan dan pembinaan sosial masyarakat desa.

Tabel 2. Realisasi Belanja Desa Berdasarkan Bidang Tahun Anggaran 2023–2024

No	Bidang Belanja	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	710.000.000	733.677.237
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	670.000.000	694.661.857
3	Pembinaan Kemasyarakatan	260.000.000	290.580.324
4	Pemberdayaan Masyarakat	95.000.000	79.200.000
	Jumlah Belanja	1.735.000.000	1.798.119.418

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami peningkatan belanja dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan operasional pemerintahan desa, seperti belanja pegawai, administrasi perkantoran, serta kegiatan pendukung tata kelola pemerintahan. Kenaikan belanja



pada bidang ini perlu dicermati agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Bidang pelaksanaan pembangunan desa juga mengalami peningkatan belanja yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen desa dalam mendorong pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pembangunan nonfisik. Peningkatan belanja pembangunan desa pada Tahun 2024 mencerminkan upaya desa dalam memperbaiki kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dalam konteks pembangunan desa, belanja pada bidang ini memiliki peran strategis karena secara langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Bidang pembinaan kemasyarakatan menunjukkan peningkatan belanja yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai perhatian desa terhadap penguatan kapasitas sosial masyarakat, termasuk kegiatan sosial, budaya, dan keamanan lingkungan. Pembinaan kemasyarakatan memiliki kontribusi penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat kohesi sosial di tingkat desa, sehingga mendukung keberhasilan program pembangunan secara keseluruhan (Putra & Rasmini, 2019).

Belanja pada bidang pemberdayaan masyarakat justru mengalami penurunan pada Tahun 2024. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya pergeseran prioritas belanja atau keterbatasan kapasitas desa dalam melaksanakan program pemberdayaan. Padahal, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk mendorong kemandirian desa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penurunan belanja pada bidang ini perlu menjadi perhatian agar tidak menghambat upaya peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Realisasi belanja desa pada Tahun Anggaran 2023–2024 menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang relatif sejalan dengan peningkatan pendapatan desa. Struktur belanja yang masih didominasi oleh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa mencerminkan fokus desa pada stabilitas administrasi dan pembangunan. Namun demikian, keseimbangan alokasi belanja antarbidang tetap perlu dijaga agar seluruh aspek pembangunan desa, termasuk pemberdayaan masyarakat, dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Rahayu & Andriani, 2020).

C. Perbandingan Kinerja Realisasi Anggaran Desa

Perbandingan kinerja realisasi anggaran desa antara Tahun Anggaran 2023 dan 2024 memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pengelolaan keuangan desa dalam dua periode anggaran yang berurutan. Kinerja realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari besaran nominal pendapatan dan belanja yang terealisasi, tetapi juga dari tingkat kesesuaian antara perencanaan yang tertuang dalam APBDes dengan pelaksanaan anggaran di lapangan. Oleh karena itu, analisis perbandingan ini menjadi penting untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta konsistensi kebijakan fiskal desa dari waktu ke waktu.

Pada Tahun Anggaran 2023, realisasi anggaran desa menunjukkan pola pengelolaan yang relatif berhati-hati. Perencanaan pendapatan dan belanja disusun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal desa serta pengalaman pengelolaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, terutama pada sisi belanja. Hal ini mengindikasikan adanya



program atau kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana sesuai rencana, baik karena faktor administratif, keterlambatan pencairan dana, maupun kendala teknis di tingkat pelaksanaan.

Memasuki Tahun Anggaran 2024, kinerja realisasi anggaran desa menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Tingkat penyerapan anggaran meningkat dan realisasi belanja menjadi lebih mendekati angka anggaran yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa. Aparatur desa tampak lebih mampu menyesuaikan perencanaan dengan kapasitas pelaksanaan, sehingga risiko terjadinya sisa anggaran yang besar dapat diminimalkan. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa pengalaman pengelolaan anggaran pada tahun sebelumnya telah menjadi bahan pembelajaran yang efektif bagi pemerintah desa.

Dari sisi pendapatan, peningkatan realisasi pada Tahun 2024 menunjukkan adanya konsistensi dalam penerimaan desa, terutama dari sumber pendapatan transfer. Realisasi pendapatan yang relatif stabil memberikan kepastian fiskal bagi desa dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Ketika pendapatan terealisasi sesuai dengan target, desa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengoptimalkan belanja tanpa harus melakukan penyesuaian anggaran yang terlalu signifikan di tengah tahun anggaran. Kondisi ini memperkuat hubungan antara perencanaan pendapatan yang realistis dengan kinerja belanja yang lebih optimal (Sari & Widyastuti, 2021).

Konsistensi antara peningkatan realisasi pendapatan dan peningkatan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya sinkronisasi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran desa. Desa tidak hanya mampu mengumpulkan pendapatan sesuai rencana, tetapi juga dapat menyalurkan anggaran tersebut ke dalam kegiatan yang telah diprogramkan. Hal ini mencerminkan kinerja keuangan desa yang lebih sehat, di mana anggaran tidak sekadar disusun sebagai dokumen formal, melainkan benar-benar menjadi instrumen operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Jika dilihat dari struktur belanja, baik pada Tahun Anggaran 2023 maupun 2024, fokus utama belanja desa relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Belanja masih didominasi oleh bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Stabilitas struktur belanja ini menunjukkan bahwa arah kebijakan anggaran desa cenderung konsisten antarperiode. Pemerintah desa tampak mempertahankan prioritas pada aspek administrasi pemerintahan dan pembangunan sebagai dua pilar utama dalam pengelolaan keuangan desa (Yuliana & Handayani, 2022).

Meskipun struktur belanja relatif stabil, terdapat perbedaan dalam tingkat efektivitas pelaksanaan belanja antarperiode. Pada Tahun Anggaran 2024, realisasi belanja pada beberapa bidang menunjukkan peningkatan yang lebih proporsional dibandingkan Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa desa semakin mampu menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan. Peningkatan efektivitas ini dapat dikaitkan dengan perbaikan mekanisme perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Perbandingan kinerja realisasi anggaran desa juga dapat dilihat dari tingkat kesesuaian antara target dan capaian. Pada Tahun Anggaran 2023, masih terdapat kecenderungan perencanaan anggaran yang bersifat normatif, di mana beberapa kegiatan direncanakan tanpa mempertimbangkan secara matang kapasitas pelaksanaan. Akibatnya, realisasi belanja tidak sepenuhnya mencapai target. Sebaliknya, pada Tahun Anggaran 2024, perencanaan anggaran



tampak lebih berbasis pada evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan menjadi lebih realistis dan mudah dicapai (Rahayu & Andriani, 2020).

Dalam perspektif good governance, peningkatan kinerja realisasi anggaran desa pada Tahun 2024 mencerminkan adanya penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ketika anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal, maka proses pertanggungjawaban keuangan desa menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat desa. Kinerja realisasi anggaran yang baik juga menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu menjalankan amanat pengelolaan keuangan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Setiawan & Nugroho, 2017).

Perbandingan kinerja realisasi anggaran desa antarperiode juga mencerminkan kemampuan adaptasi pemerintah desa terhadap dinamika kebijakan dan kondisi lingkungan. Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa desa lebih adaptif dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah di atasnya. Adaptasi ini tercermin dari kemampuan desa dalam menyesuaikan pelaksanaan anggaran tanpa harus melakukan perubahan anggaran yang terlalu sering atau signifikan. Kemampuan adaptasi tersebut merupakan indikator penting dari kapasitas kelembagaan pemerintah desa.

Dari sudut pandang implementasi kebijakan, perbaikan kinerja realisasi anggaran desa pada Tahun Anggaran 2024 juga menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan APBDes semakin dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh aparatur desa. Proses administrasi, pencairan dana, serta pelaksanaan kegiatan tampak berjalan lebih tertib dan terkoordinasi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa semakin matang dan terinternalisasi dalam praktik pemerintahan desa (Soleh & Rochmansjah, 2020).

Meskipun demikian, perbandingan kinerja realisasi anggaran desa juga mengungkapkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas belanja. Peningkatan realisasi belanja belum tentu selalu berbanding lurus dengan peningkatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, selain mengejar tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, desa juga perlu memastikan bahwa belanja yang direalisasikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara berkelanjutan (Zulkifli & Rahmawati, 2021).

Dalam akuntabilitas Dana Desa, kinerja realisasi anggaran yang lebih baik pada Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya pengelolaan dana publik secara bertanggung jawab. Realisasi anggaran yang mendekati target mencerminkan bahwa dana yang diterima desa tidak hanya disimpan atau ditunda penggunaannya, tetapi benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan keberlanjutan dukungan fiskal dari pemerintah pusat (Sutaryo & Carolina, 2017).

Perbandingan kinerja realisasi anggaran desa antara Tahun Anggaran 2023 dan 2024 menunjukkan tren perbaikan yang positif. Tahun 2024 dapat dipandang sebagai periode di mana pengelolaan anggaran desa menjadi lebih efektif, konsisten, dan akuntabel dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran mencerminkan adanya pembelajaran institusional yang berjalan dengan baik di tingkat desa. Dengan mempertahankan dan meningkatkan praktik pengelolaan anggaran yang telah dicapai



pada Tahun 2024, desa memiliki peluang yang lebih besar untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja desa pada Tahun Anggaran 2023–2024 menunjukkan struktur fiskal yang stabil dengan dominasi pendapatan transfer. Belanja desa sebagian besar dialokasikan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dibandingkan Tahun 2023, realisasi anggaran Tahun 2024 menunjukkan tingkat penyerapan yang lebih baik dan konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran desa pada periode tersebut berjalan secara berkelanjutan dan terarah sesuai dengan fungsi utama pemerintahan dan pembangunan desa.

Daftar Rujukan

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Astuti, T. P., & Yulianto, A. (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang Desa. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam konteks otonomi daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 75–86.
- Huda, N. (2020). Otonomi daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 135–148.
- Kurniawan, R. (2019). Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa berbasis kinerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 89–102.
- Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 4(1), 1–15.
- Nasution, M. A. (2018). Analisis pengelolaan keuangan desa pasca implementasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 97–110.
- Putra, I. G. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2095–2123.
- Rahayu, S., & Andriani, L. (2020). Evaluasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 287–300.
- Sari, D. P., & Widyastuti, T. (2021). Analisis laporan realisasi anggaran sebagai alat pengukuran kinerja keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 45–59.
- Setiawan, A., & Nugroho, R. (2017). Pengelolaan keuangan desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Publik*, 3(2), 101–114.
- Soleh, A., & Rochmansjah, H. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan APBDes di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 55–68.
- Sutaryo, & Carolina, Y. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 156–174.
- Yuliana, R., & Handayani, S. (2022). Analisis struktur pendapatan dan belanja desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 7(1), 23–36.



Zulkifli, & Rahmawati. (2021). Kinerja realisasi anggaran desa dalam mendukung pembangunan desa. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 81–94.